

ANALISIS RASIO UNTUK MENGUKUR KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SURABAYA

Marratus Sholikhah

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jln. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Sukolilo Surabaya, Telp 031-5931800

email : likha1259@gmail.com

ABSTRAK

Laporan keuangan disajikan kepada pemangku kepentingan bukan untuk mempersulit dan membingungkan pembacanya tapi justru untuk membantu mereka dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Surabaya dengan menggunakan rasio keuangan. Penelitian ini menggunakan analisis rasio lancar (current ratio), analisis rasio utang terhadap ekuitas (total debt to equity), analisis pertumbuhan arus kas, analisis rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi PAD. Berdasarkan dari hasil analisis kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan penelitian yang diukur melalui analisis rasio keuangan (Neraca, Arus Kas dan Laporan Realisasi Anggaran) secara keseluruhan analisis rasio yang digunakan sudah menjelaskan bahwa kinerja pengelolaan keuangan sudah baik pada periode tahun 2014 – 2016.

Kata kunci : Analisis rasio keuangan, kinerja keuangan

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kinerja Pemerintah Daerah seharusnya mendapatkan perhatian lebih, bukan hanya Pemerintah Pusat saja yang menyorotinya, namun hal tersebut juga dilakukan oleh masyarakat setempat karena berkaitan dengan manfaat yang akan diterima masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan. Kinerja Pemerintah Daerah harus bisa dipertanggungjawabkan, mengingat bahwa Pemerintah Daerah berhak, berkewajiban dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat (UU No.23 Tahun 2014). Laporan keuangan disajikan kepada pemangku kepentingan untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih berkualitas. Oleh karena itu laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan dengan tepat waktu dan dapat diandalkan.

Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan, analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk mengintepresikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan kinerja organisasi yang sejenis (Mahmudi 2016:90).

Di dalam penelitian kinerja keuangan terdapat komponen – komponen yang terkait yang diberlakukan menurut Mahmudi, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (2016) antara lain berdasarkan Neraca, Realisasi Anggaran dan Arus Kas antara lain : Rasio Lancar, Rasio Utang Terhadap Ekuitas, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD Dan Pertumbuhan Arus Kas

Tujuan umum laporan keuangan Pemerintah adalah untuk menyajikan posisi keuangan neraca, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas laporan pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (SAP Nomor 1 Par:9).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya” yang akan diamati di Kota Surabaya (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur). Pengukuran kinerja karyawan ini sangat penting bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif dan efisien.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana kinerja pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan analisis rasio keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Surabaya dengan menggunakan rasio keuangan.”

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan mampu menambah informasi mengenai kinerja Pemerintah Kota Surabaya dan menjadi masukan agar kinerja daerah lebih baik lagi selain itu hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi serta wawasan masyarakat

tentang kinerja keuangan Kota Surabaya dan menjadi pembanding dengan penelitian terdahulu dan menjadi sumbangan pemikiran bagi semua yang membaca.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Keuangan Daerah

Menurut PP 71 Tahun 2010 Keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, dan provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak – pihak eksternal entitas pemerintah daerah. Pihak – pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), badan pengawas keuangan, investor, kreditur, dan donator. Faktor yang paling mendominasi pada pengukuran kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yaitu dalam mengelola keuangan daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara langsung maupun tidak langsung (Halim, 2007:230).

Komponen –komponen yang terdapat dalam laporan keuangan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah sebagai berikut : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan.

2.2 Rasio Keuangan Daerah

Analisis Laporan keuangan merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik Mahmudi (2016:89)

Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan, analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk mengintepresikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan kinerja organisasi yang sejenis (Mahmudi 2016:90).

Jadi analisis rasio keuangan adalah suatu kegiatan yang membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan serta menilai kinerja manajemen dalam suatu periode tertentu. Terdapat berbagai macam analisis laporan keuangan antara lain Berdasarkan Laporan Neraca, Laporan Realisai Anggaran dan Arus Kas.

1. Berdasarkan Laporan Neraca Menurut Mahmudi, (2016: 108) :

Informasi aset dalam neraca juga sangat penting untuk menghitung rasio keuangan tertentu. Karena tujuan menggunakan rasio tersebut dalam rangka menilai kinerja keuangan yang berhubungan dengan laba. Sementara itu, di sektor publik tidak tersedianya informasi laba menyebabkan analisis rasio keuangan yang biasa digunakan sektor bisnis tidak dapat diaplikasikan di sektor publik. Namun ada hal juga analisis rasio keuangan yang dapat digunakan baik di sektor bisnis maupun publik, seperti analisis likuiditas dan solvabilitas.

Rasio – rasio keuangan yang dapat digunakan dalam analisis laporan keuangan pemerintah daerah antara lain :

1. Rasio Likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Walaupun pemerintah daerah sudah menyusun anggaran kas, tetapi analisis likuiditas akan lebih bermanfaat bagi manajemen dibandingkan jika hanya mendasarkan pada anggaran kas saja. Untuk melakukan analisis likuiditas yang dipakai untuk melakukan analisa yaitu rasio sebagai berikut berikut :

a. Rasio Lancar (current ratio) membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki pemerintah daerah pada tanggal neraca dengan utang jangka pendek. Rasio lancar merupakan ukuran standar untuk menilai kesehatan keuangan organisasi, baik organisasi bisnis maupun pemerintah daerah. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi utangnya.

2 . Rasio Utang (leverage) Rasio Utang terhadap modal (total debt to equity ratio) Rasio utang sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam membuat keputusan pemberian kredit. Untuk melakukan analisis likuiditas yang dipakai untuk melakukan analisa yaitu rasio sebagai berikut berikut :

a. Rasio Utang Terhadap Ekuitas (Total Debt to Equity Ratio) adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Rasio ini mengindikasikan serapa besar pemerintah daerah mungkin sudah kelebihan utang (over – laveraged), dan harus segera mencari jalan untuk mengurangi utang. Semakin besar rasio ini menunjukkan risiko pemberian utang semakin besar.

2 . Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Mahmudi, (2016 :140) :

1 . Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta

pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Berpatokan pada Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”, empat pola yang diperkenalkan tentang hubungan situasional yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang berkaitan dengan tingkat kemandirian daerah yaitu:

- a. Pola hubungan instruktif, yaitu peran Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah.
- b. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang, karena daerah telah dianggap mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c. Pola hubungan partisipatif, yaitu peran Pemerintah Pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
- d. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. Pola hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah serta tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah dapat disajikan dalam matriks seperti Tabel berikut ini:

Tabel 2.2.1

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber : Halim, 2004

2. Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 2.1.2
Rasio Efektivitas PAD

% Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100 %	Sangat Efektif
100 %	Efektif
90 % - 99%	Cukup Efektif
75 % - 89 %	Kurang Efektif
< 75 %	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi, 2016

Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, indikator rasio efektivitas PAD saja belum cukup, sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektivitasnya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, maka berarti pemungutan PAD tersebut tidak efisien. Oleh karena itu perlu pula dihitung rasio efisiensi PAD.

2 . Berdasarkan Arus Kas Menurut Mahmudi, (2016 :193) :

Laporan Arus Kas merupakan informasi keuangan yang sangat penting baik bagi manajemen maupun pengguna laporan eksternal, misalnya investor, kreditor, donor dan masyarakat. Berbeda dengan laporan keuangan neraca dan Laporan Realisasi Anggaran yang masih memungkinkan dilakukan manipulasi laporan misalnya dalam bentuk *window dressing*, Laporan Arus Kas relatif sulit dimanipulasi. Laporan Arus Kas tersebut mencerminkan kondisi objektif kas, perubahan selama satu periode, arus masuk dan keluar kas yang sangat jelas yang dapat diuji kebenarannya dengan melihat neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Realisasi Anggaran. Terdapat beberapa teknik atau cara untuk melakukan analisis Laporan Arus Kas yaitu :

a. Analisis Pertumbuhan Arus Kas

Analisis Perumbuhan arus kas bermanfaat untuk mengetahui perkembangan atau pertumbuhan kas dari masing – masing aktivitas selama beberapa tahun.

Pertumbuhan arus kas ini dapat digunakan untuk :

1. Menilai bagus tidaknya fundamental fiskal pemerintah daerah.
2. Menilai, Mengevaluasi, dan memproyeksi arah kebijakan keuangan daerah.
3. Memperbaiki manajemen arus kas di masa depan

2.3 Pengukuran Kinerja Pemerintah

Menurut PP No. 8 Tahun 2006, kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Dengan demikian kinerja mencerminkan hasil atau prestasi kerja yang dapat dicapai oleh seseorang, unit kerja, dan atau suatu organisasi pada periode tertentu sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam upaya mencapai tujuan secara legal serta sesuai moral dan etika. Kinerja keuangan tercermin dari laporan keuangan neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas. Laporan keuangan perlu dianalisis untuk bisa memberikan gambaran kinerja keuangan Mahmudi (2016:89).

3. Metode Penelitian

3.1 Desain Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, waktu yang digunakan dalam pengumpulan data adalah *cross sectional* yaitu data hanya sekali dikumpulkan dalam satu periode, dengan cara observasi dan dokumentasi, dengan mempelajari dokumen atau laporan keuangan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3.2 Populasi Dan Sampel

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Surabaya dan Sampel pada penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah Pemerintah Kota Surabaya

3.3 Definisi Variabel dan Definisi Operasional

3.3.1 Definisi Variabel

Penelitian ini menggunakan Variabel Independen Variabel Bebas (X) yaitu Analisis Rasio Keuangan dan Variabel Terikat Dependen (Y) yaitu Kinerja Pengelolaan Keuangan

3.3.2 Definisi Operasional

Variabel Independen (bebas) atau (X) yaitu analisis rasio keuangan diukur menggunakan formula sebagai berikut :

a. Neraca

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Utang Terhadap Ekuitas} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Jumlah Ekuitas Dana}} \times 100\%$$

b. Arus Kas

1. Menilai bagus tidaknya fundamental fiskal pemerintah daerah.
2. Menilai, Mengevaluasi, dan memproyeksi arah kebijakan keuangan daerah.
3. Memperbaiki manajemen arus kas di masa depan

Variabel Dependen (terikat) atau (Y) yaitu analisis rasio keuangan diukur menggunakan formula sebagai berikut :

c. Laporan Realisasi Anggaran

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

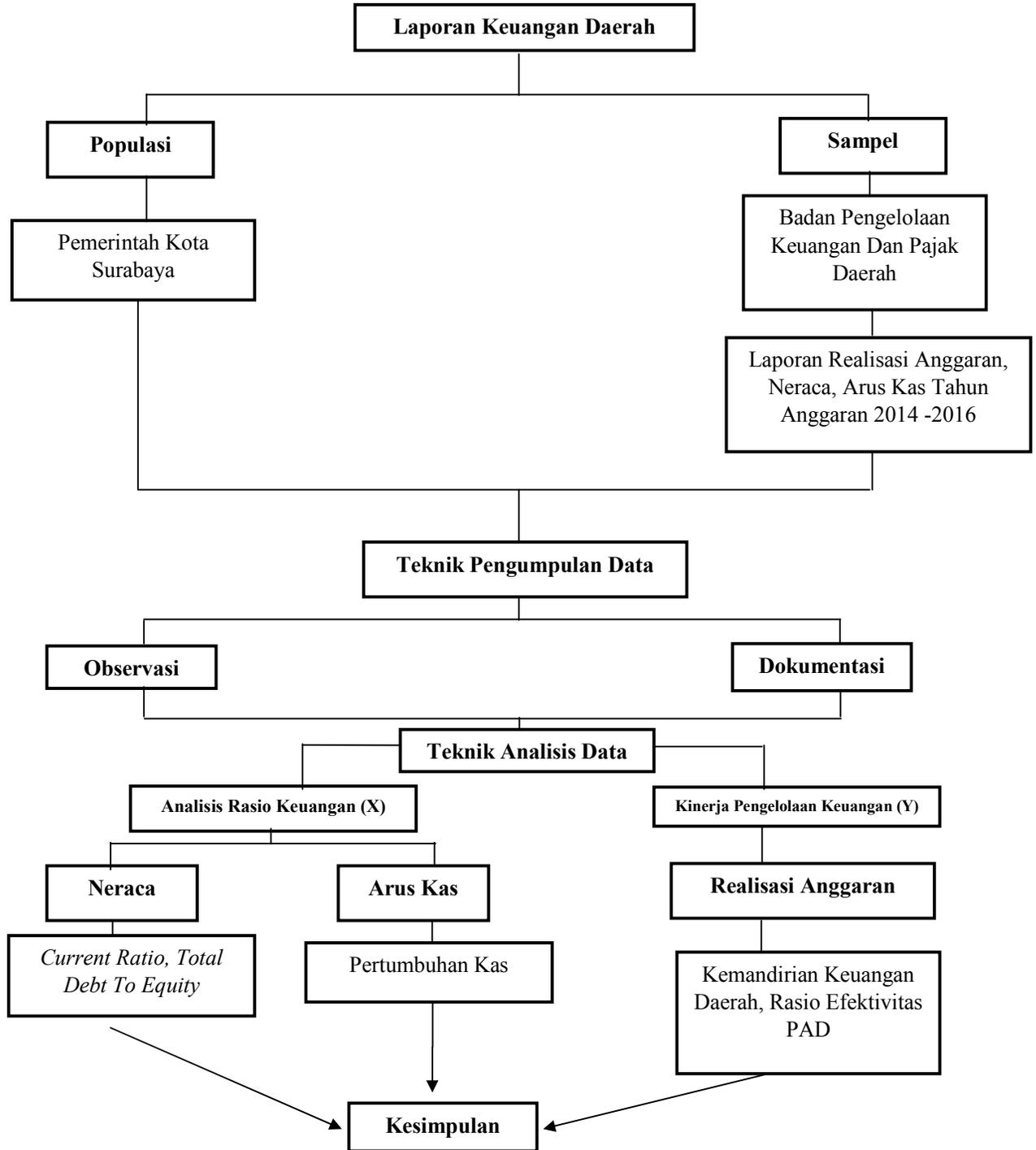
3.4 Sumber Data

Sumber data yang diperlukan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini yaitu data yang di ambil langsung atau diperoleh dari pihak yang menguasai dari objek kajian. Data sekunder pada penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari referensi ilmiah dan dokumentasi pada Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014-2016 pada Pemerintah Kota Surabaya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Observasi pada penelitian ini dengan mengadakan peninjauan secara langsung pada Pemerintah Kota Surabaya untuk mendapatkan data Dan Dokumentasi berupa dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan Kota Surabaya.

3.6 Kerangka Konseptual



3.7 Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Analisis kinerja keuangan Kota Surabaya dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian dan pelaksanaan Pemerintah Kota Surabaya dalam bidang keuangan periode 2014-2016. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya sebagai berikut :

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio Lancar membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki pemerintah daerah pada tanggal neraca dengan utang jangka pendek.

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2014} &= \frac{\text{Rp. 1.715.672.127.792}}{\text{Rp. 105.182.299.203}} \times 100\% \\ &= 1631\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{\text{Rp. 2.082.844.330.269}}{\text{Rp. 372.825.063.102}} \times 100\% \\ &= 559\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{\text{Rp. 1.654.650.498.206}}{\text{Rp. 393.696.308.637}} \times 100\% \\ &= 420\% \end{aligned}$$

Tabel 3.1
Rasio Lancar (*Current Ratio*)
Pemerintah Kota Surabaya

Tahun	Aktiva Lancar	Hutang Lancar	Rasio Lancar(%)
2014	1,715,672,127,792	105,182,299,203	1631%
2015	2,082,844,330,269	372,825,063,102	559%
2016	1,654,650,498,206	393,696,308,637	420%

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (diolah Penulis)

Berdasarkan tabel 5.1 diatas dapat kita lihat bahwa rasio lancar (*current ratio*) pada Pemerintah Kota Surabaya periode Tahun 2014-2016 mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena setiap tahunnya Pemerintah Kota Surabaya mempunyai hutang yang pada setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2014 memiliki rasio lancar sebanyak 1631% , pada tahun 2015 memiliki rasio lancar sebanyak 559% dan pada tahun 2016 memiliki rasio lancar sebanyak 420%.

2. Rasio Utang Terhadap Ekuitas (*Total Debt Equity*)

Rasio Utang terhadap ekuitas yang digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang.

$$\text{Rasio Utang Terhadap Ekuitas} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Jumlah Ekuitas Dana}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2014} &= \frac{\text{Rp. } 105.182.299.203}{\text{Rp. } 38.500.755.366.136} \times 100\% \\ &= 0.27 \% \\ \text{Tahun 2015} &= \frac{\text{Rp. } 372.825.063.102}{\text{Rp. } 37.850.011.942.479} \times 100\% \\ &= 0.98 \% \\ \text{Tahun 2016} &= \frac{\text{Rp. } 402.839.748.137}{\text{Rp. } 37.731.763.820.637} \times 100\% \\ &= 0.01 \% \end{aligned}$$

Tabel 3.2
Rasio Utang Terhadap Ekuitas (*Total Debt Equity*)
Pemerintah Kota Surabaya

Tahun	Total Utang	Jumlah Ekuitas Dana	Rasio (%)
2014	105.182.299.203	38.500.755.366.136	0,27 %
2015	372.825.063.102	37.850.011.942.479	0,98 %
2016	402.839.748.137	37.731.763.820.637	0,01 %

Sumber data :Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (diolah Penulis)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Rasio Utang Terhadap Ekuitas (*Total Debt Equity*) pada Pemerintah Kota Surabaya Periode 2014-2016 rasionya mengalami Penurunan meskipun pada Tahun 2015 rasionya mengalami kenaikan. Pada tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2014 memiliki rasio 0,27% , pada tahun 2015 memiliki rasio 0,98% dan pada tahun 2016 memiliki rasio 0,01%. Dengan penurunan rasio tersebut menunjukkan keuangan Pemerintah Kota Surabaya mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang – hutangnya dengan modal yang telah dimilikinya.

3. Pertumbuhan Arus Kas

Analisis pertumbuhan arus kas bermanfaat untuk mengetahui perkembangan atau pertumbuhan kas dari masing – masing aktivitas selama beberapa tahun.

Pertumbuhan arus kas ini dapat digunakan untuk :

1. Menilai bagus tidaknya fundamental fiskal pemerintah daerah.
2. Menilai, Mengevaluasi, dan memproyeksi arah kebijakan keuangan daerah.
3. Memperbaiki manajemen arus kas di masa depan.

Tabel 3.3
Porsentase Pertumbuhan Arus Kas Tahun 2014 - 2016

ARUS KAS BERSIH	Pertumbuhan Arus Kas		
	2014	2015	2016
Aktivitas Operasi	15,65 %	14,16 %	(23,58) %
Aktivitas Investasi	10,58 %	27,99 %	(0,08)%
Aktivitas Transitoris	(133,53) %	(290,46) %	363,12 %

Dengan melihat pertumbuhan arus kas selama tiga tahun terakhir, secara kilas dapat ditangkap sinyal adanya penurunan kinerja keuangan pada tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014, meskipun secara keseluruhan masih dalam kategori sehat. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Arus kas operasi yang baik adalah arus kas yang bersaldo positif dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun pada tahun 2014 mengalami positif yaitu 15,65% dan pada tahun 2015 juga mengalami pertumbuhan positif yaitu 14,6%, sedangkan pada tahun 2016 mengalami negatif yaitu - 23,58%. Namun secara keseluruhan hal ini mengindikasikan bahwa kinerja Pemerintah Kota Surabaya adalah baik,

2. Arus kas Investasi yang baik adalah bersaldo negatif, dimana hal ini menunjukkan adanya pengeluaran kas untuk belanja modal yang lebih besar dibanding penerimaan kas dari penjualan aset tetap pada tahun 2014 telah terjadi peningkatan arus kas investasi yang sangat tajam, yaitu meningkat sebesar Rp. 135.260.734.549 atau 10,58 % dan pada tahun 2015 meningkat sebesar Rp. 395.653.774.233 atau 27,99%, Sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp. - 1.471.648.831 atau -0.08%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi pengurangan terhadap belanja modal, seperti pembangunan infrastruktur dan irigasi.
3. Arus Kas Transitoris pada tahun 2014 – 2016 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp. - 6.939.340.080 atau -133,53%, pada tahun 2015 mengalami kenaikan Rp. 5.061.074.910 atau -290,46% sedangkan pada tahun 2016 mengalami kenaikan yang bersaldo positif sebesar Rp. 12.050.466.036 atau 363,12%. Hal ini dapat diindikasikan bahwa pada tahun 2014 – 2016 banyak pengeluaran yang terkait pengeluaran perhitungan pihak ketiga dan sisa UP tahun yang lalu.

4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{\text{Rp. 3.247.459.154.137}}{\text{Rp. 2.879.105.797.766}} \times 100\%$$

$$= 113 \%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{\text{Rp. 3.782.647.234.297}}{\text{Rp. 2.834.807.600.077}} \times 100\%$$

$$= 133 \%$$

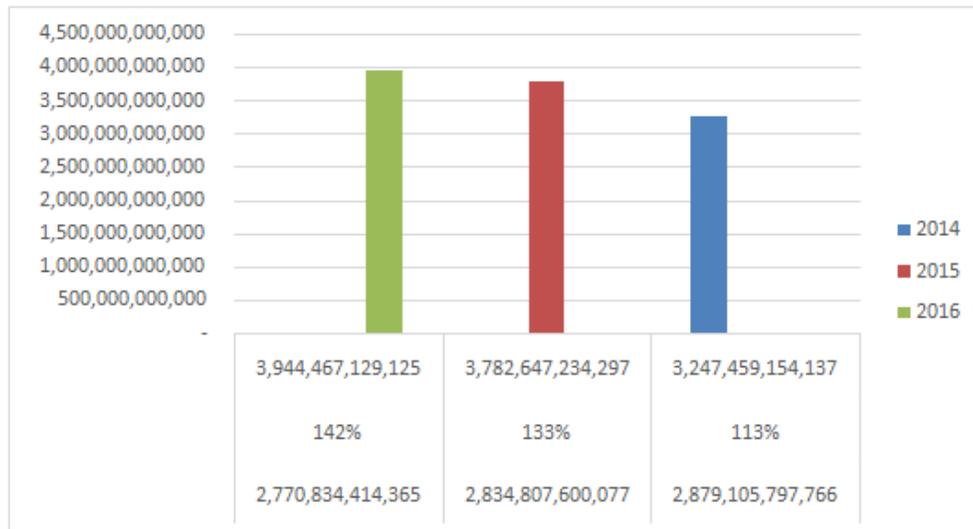
$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{\text{Rp. 3.944.467.129.125}}{\text{Rp. 2.770.834.414.365}} \times 100\% \\ &= 142\% \end{aligned}$$

Tabel 3.4
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Pemerintah Kota Surabaya

Tahun	PAD	Total Pendapatan	Rasio RKKD(%)	Keterangan
2014	3.247.459.154.137	2.879.105.797.766	113 %	Delegatif
2015	3.782.647.234.297	2.834.807.600.077	133 %	Delegatif
2016	3.944.467.129.125	2.770.834.414.365	142 %	Delegatif

Sumber data :Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (diolah Penulis)

Gambar 3.1
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah



Dapat kita lihat pada tabel untuk tahun 2014 rasio kemandirian keuangan daerah 113 %, pada tahun 2015 rasio kemandirian keuangan daerah mengalami peningkatan sebanyak 20 % yang ditunjukkan pada tabel pada tahun 2015 yaitu 133%, Dan Pada tahun 2016 juga mengalami kenaikan tapi tidak banyak hanya 9 % yang ditunjukkan pada tabel diatas pada tahun 2016 yaitu 142 %. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surabaya mencapai tingkatan sangat baik, menurut Halim yang menunjukkan pola hubungan delegatif, yang artinya campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar – benar mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. Jika dilihat dari tabel diatas bisa disimpulkan jika semakin tinggi persentasenya maka tingkat kemandirian keuangan daerahnya semakin baik.

5. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan.

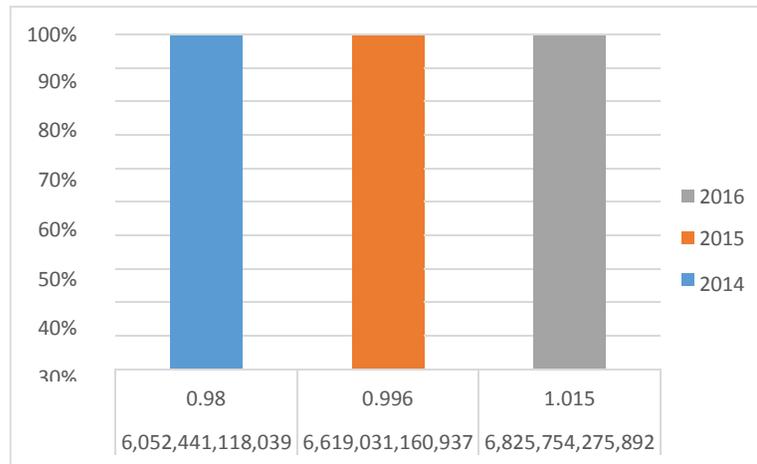
$$\begin{aligned} & \text{Realisasi Penerimaan PAD} \\ \text{Rasio Efektivitas PAD} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\% \\ \text{Tahun 2014} &= \frac{\text{Rp. 6.052.441.118.039}}{\text{Rp. 6.150.194.212.903}} \times 100\% \\ &= 98 \% \\ \text{Tahun 2015} &= \frac{\text{Rp. 6.619.031.160.937}}{\text{Rp. 6.642.257.716.374}} \times 100\% \\ &= 99,6 \% \\ \text{Tahun 2016} &= \frac{\text{Rp. 6.825.754.275.892}}{\text{Rp. 6.720.301.543.490}} \times 100\% \\ &= 101,5 \% \end{aligned}$$

Tabel 3.5
Rasio Efektivitas PAD
Pemerintah Kota Surabaya

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Target Penerimaan PAD	Rasio Efektivitas(%)	Keterangan
2014	6.052.441.118.039	6.150.194.212.903	98 %	Cukup Efektif
2015	6.619.031.160.937	6.642.257.716.374	99,6 %	Efektif
2016	6.825.754.275.892	6.720.301.543.490	101,5 %	Sangat Efektif

Sumber data :Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (diolah Penulis)

Gambar 3.2
Rasio Efektivitas PAD



Pada tahun 2014 yang mencapai 98%, menurut Mahmudi dapat dikatakan Cukup Efektif. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan 1,6% atau bisa kita lihat diatas pada tahun 2015 mencapai 99,6%, menurut Mahmudi dapat dikatakan Efektif, sedangkan pada tahun 2016 mengalami kenaikan paling besar yaitu 1,9% atau pada tabel dijelaskan melalui persentase yaitu 101,5%, menurut Mahmudi dapat dikatakan Sangat Efektif persentase tersebut melebihi efektif yaitu melebihi persentase 100%. Sedangkan Pemerintah Kota Surabaya mencapai >100%, Hal tersebut menunjukkan Pemerintah Kota Surabaya Sangat Efektif dalam mengelola Anggaran Pendapatan Belanja dan dapat kita dikatakan Pemerintah Kota Surabaya telah berhasil mewujudkan sasaran dan mencapai tujuannya.

4. Simpulan Dan Saran

4.1 Simpulan

Berdasarkan dari hasil analisis kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan penelitian yang diukur melalui analisis rasio keuangan (Neraca, Arus Kas dan Laporan Realisasi Anggaran) secara keseluruhan analisis rasio yang digunakan sudah menjelaskan bahwa kinerja pengelolaan keuangan sudah baik pada periode tahun 2014 - 2016, yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Dilihat Pada Rasio Lancar (*Current Ratio*) mengalami penurunan pada periode 2014 – 2016. Hal ini terjadi karena setiap tahunnya Pemerintah Kota Surabaya mempunyai hutang yang setiap tahunnya mengalami kenaikan

2. Dilihat Pada rasio Utang Terhadap Ekuitas (*Total Debt Equity*) Rasionya mengalami penurunan. Dengan adanya penurunan rasio tersebut menunjukkan Pemerintah Kota Surabaya mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang – hutangnya dengan modal yang telah dimiliki.
3. Dilihat Pada Analisis Pertumbuhan Arus Kas pada Arus Kas Operasi selama tahun 2014 - 2016 bersaldo positif, ini menunjukkan merupakan hal yang bagus yang menunjukkan tidak adanya kesulitan keuangan di pemerintah daerah. Sedangkan pada arus kas investasi selama tahun 2014 – 2016 bersaldo positif negative, berarti pemerintah daerah selama dua tahun tersebut aktif melakukan pengembangan fisik dalam bentuk pembangunan. Dan t pada arus kas transitoris pada tahun 2014 – 2016 mengalami kenaikan. Hal ini dapat diindikasikan bahwa pada tahun 2014 – 2016 banyak pengeluaran yang terkait pengeluaran perhitungan pihak ketiga dan sisa UP tahun yang lalu.
4. Dilihat Pada Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, Rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya mencapai tingkatan sangat baik pada periode tahun 2014-2016. Jika dilihat dari tabel diatas bisa disimpulkan jika semakin tinggi persentasenya maka tingkat kemandirian keuangan daerahnya semakin baik.
5. Dilihat Pada Rasio Efektivitas PAD menunjukkan Pemerintah Kota Surabaya Sangat Efektif karena persentase yang dimiliki yaitu >100% sehingga, dalam mengelola Anggaran Pendapatan Belanja dan dapat dikatakan Pemerintah Kota Surabaya telah berhasil mewujudkan sasaran dan mencapai tujuannya.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang diberikan peneliti sebagai berikut : Untuk Pemerintah Surabaya langkah baiknya tidak memiliki hutang yang lebih besar setiap tahunnya, supaya Pemerintah Kota Surabaya mampu untuk melunasi hutangnya, selain itu semoga Pemerintah Kota Surabaya mampu mempertahankan dan meningkatkan kondisi yang sudah baik yang telah terjadi. Untuk Peneliti Selanjutnya supaya lebih jelas dan lebih baik dalam melakukan analisis mengenai kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim. (2007). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah,*
Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat.
- Mahmudi., 2016, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,*Yogyakarta:
UPPAMP YKPN.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Keuangan Sektor Publik.* Yogyakarta: Andi
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,
kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta
- Yunita Anggraini dan B. Hendra Puranta, "Anggaran berbasis kinerja", UPP
STIM YKPN Tahun 2010 hal 9*

